

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) dan berdasarkan Pasal 147 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD berpedoman pada arah kebijakan dan isu strategis, serta mengacu kepada RPJMD untuk keselarasan program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta dengan memperhatikan rancangan RPJMD 2021-2026 Provinsi Sulawesi Tengah.

Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 3 Bulan ke depan, di samping itu, Renja berfungsi pula sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dengan dukungan penuh dari semua ASN Biro Organisasi Mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi sampai dengan Jabatan Pelaksana dan Fungsional, diharapkan Renja ini akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat mendukung tercapainya Indikator Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 12 September 2025

KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULTENG



NENG ELLY, SH, MM
Pembina Utama Muda
Nip.19730601 199503 2 002

PENDAHULUAN

Perencanaan Kinerja Perubahan Tahun 2025 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2025- 2029 Biro Organisasi sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Biro Organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Biro Organisasi ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Biro Organisasi ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis periode 2025-2029 Biro Organisasi. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan Perubahan bagi Biro Organisasi.

Perencanaan kinerja Perubahan ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2025 menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-saran yang telah ditetapkan.

Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sulteng :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287)
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tentang Pedomaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 1213);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tanggal tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklaturt Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
- 11 Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 MAKSUD dan TUJUAN

Dokumen Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025 Biro Organisasi ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya. Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 maka diharapkan Dokumen Rencana Kerja Perubahan ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini Biro Organisasi akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber – sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini juga terdapat informasi – informasi yang akan memudahkan Biro Organisasi dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 ini, memuat Program program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi. Sistematika penyajian Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Memuat Latar belakang, Landasan hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD, Analisa kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan.

IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Rencana Kerja PD beserta anggaran sesuai dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

V. PENUTUP

BAB II**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BIRO ORGANISASI TAHUN TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Biro Organisasi.**

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Biro Organisasi Tahun 2024 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2025, serta progress pencapaian kinerja dalam RENSTRA Periode 2024 sehingga dapat teridentifikasi, Sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2024 kami perkirakan bahwa pelaksanaan sampai sejauh mana Biro Organisasi melaksanakan program dan kegiatannya. Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan program/kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Ringkasan Jumlah Anggaran belanja Biro Organisasi pada Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra
SKPD Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah

No	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2022(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Sakip, Indeks RB Indeks IKM	10 per 0 se n	2.434.501.465	2.411.201.890	99.04%
	4.01.01.1.01	Perencanaan, anggaran dan valuasi Kinerja erangkat Daerah	Terlaksannya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja PD Yang tepat Waktu	8 Dok	64.840.950	64.418.150	99.35%

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

No	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2022(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja, RKT, Lapkin dan Reformasi Birokrasi dan laporan keuangan	8 Dok	64.840.950	64.418.150	99.35%
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannnya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	10 Perse 0 n	361.590.000	360.252.000	99.63%
	4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 orang	361.590.000	360.252.000	99.63%
	4.01.01.1.05	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksannnya administrasi kepegawaian PD	10 Perse 0 n	446.813.000	442.871.660	99.12%
	4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah paket Pakain Dinas beserta Atribut kelengkapan	8 lemb r	38.540.000	38.473.000	99.83%
	4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	13 orang	408.273.000	404.398.660	99.05%
	4.01.01.1.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksannnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 perse 0 n	1.200.831.415	1.190.098.130	99.11%
	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediahkankeuanga n	5 paket	582.304.365	580.190.150	99.64%
	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediahkan	5 Paket	29.999.950	29.912.575	99.71%
	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraa n Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	588.527.100	579.995.405	98.55%
	4.01.01.1.08	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	1 unit	22.220.000	21.000.000	94.51%

No	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2022(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.01.01.1.08	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang disediakan	1 Unit	22.220.000	21.000.000	94.51%
	4.01.01.1.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Perse n	23.876.100	23.278.550	98.32%
	4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Lap	23.876.100	23.278.550	98.32%
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksannya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	52 Unit	314.530.000	309.283.400	98.33%
	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22 Unit	257.900.000	252.653.400	97.97%
	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	56.530.000	56.630.000	100%
	4.01.02	PENATAAN ORGANISASI	Persentase Penataan Organisasi	10 Perse 0 n	2.875.821.825	2.769.861.358	96.32%
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksannya Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Perse 0 n	1.148.523.300	1.118.647.671	97.40%
	4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	1 Dok	266.487.700	261.213.036	98.02%

No	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2022(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota	13 Dok	242.312.050	222.636.120	91.88%
	4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dok Analisis jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan	18 8 Dok	639.723.550	634.798.515	99.23%
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksannnya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		1.727.298.625	1.651.213.687	95.60%
	4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dok	584.720.725	544.911.081	93.19%
	4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas kinerja	2 Dok	417.588.000	409.456.740	98.05%
	4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	47 /1 3 PD&K ab/K ota	83.190.000	82.388.840	99.04%
	4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	JumlahDokumen hasil Pengelolaan tata laksana Pemerintahan	47 /1 3 PD&K ab/K ota	187.350.250	182.531.460	97.43%
	4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	47 /1 3 PD&K ab/K ota	454.449.650	431.925.560	95.04%
Jumlah					5.310.323.390	5.181.063.248	98%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Organisasi.

Khusus untuk Biro Organisasi sampai dengan saat ini ada Indikator Kinerja Utama yang harus di capai ditentukan dalam Indikator Kinerja

Pelayanan Publik Oleh karena itu Biro Organisasi menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi yang berkaitan. Berikut tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Organisasi Setda Prov. Sulteng :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Organisasi

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IK M	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2022	2023	2024	2024	2022	2023	2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1	Thn n	Thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					4.220.949.725	5.224.888.845	5.310.323.390		4.076.652.461	5.059.982.996	5.181.063.248	
	Terlaksannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				1.096.296.825	1.933.747.295	2.434.501.465		1.089.209.350	1.900.825.250	2.411.201.890	
	Terlaksannya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja PD Yang tepat Waktu				71.472.025	85.130.050	64.840.950		71.453.825	85.003.050	64.418.150	
	Tersediannyadokumen laporan capaian kinerja dan Laopran Keuangan				71.472.025	85.130.050	64.840.950		71.453.825	85.003.050	64.418.150	
	Terlaksannya Administrasi keuangan Perangkat Daerah				301.092.000	417.882.000	361.590.000		300.939.500	414.882.000	360.252.000	
	Tersediannya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				301.092.000	417.882.000	361.590.000		300.939.500	414.882.000	360.252.000	
	Terlaksannya administrasi kepegawaian PD				40.000.000	36.975.018	446.813.000		40.000.000	36.885.000	442.871.660	
	Tersediannya Pakaian Dinas Beserta beserta perlengkapannya				40.0000.000	27.225.018	38.540.000		40.000.000	27.135.000	38.473.000	
	Terlaksannya pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				0	9.750.000	408.273.000		0	9.750.000	404.398.660	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IK M	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2022	2023	2024	2024	2022	2023	2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1	Thn n	Thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat Daerah				468.726.350	1.113.520.177	1.200.831.415		462.935.840	1.087.734.450	1.190.098.130	
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				49.660.150	49.660.150	582.304.365		49.656.150	547.513.340	580.190.150	
	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan				30.000.200	30.000.200	29.999.950		30.000.200	30.799.950	29.912.575	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				389.066.300	389.066.000	588.527.100		383.279.490	509.421.160	579.995.405	
	Terlaksannya Pengadaan Barang Milik Daerah				0	0	22.220.000		0	0	21.000.000	
	Tersediannya kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0	0	22.220.000		0	0	21.000.000	
	Terlaksannya Penyediaan jasa Penunjang				23.676.150	23.676.150	23.676.100		23.676.150	35.400.050	23.278.55	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				23.676.150	23.676.150	23.676.100		23.676.150	35.400.050	23.278.550	
	Terlaksannya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				191.330.000	191.330.000	314.530.000		190.204.035	240.920.700	309.283.400	
	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				154.380.000	154.380.000	257.900.000		153.254.035	195.240.700	252.653.400	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2022	2023	2024	2024	2022	2023	2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1	Thn n	Thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Terpeliharanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.950.000	36.950.000	56.530.000		36.950.000	45.680.000	56.630.000	
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)				3.124.653.025	3.291.141.550	2.875.821.925		2.987.43.111	3.159.157.746	2.769.861.358	
	Indeks Kematangan Organisasi											
	Indeks Reformasi Birokrasi											
	Persentase Penataan Jabatan ASN sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah											
	Terlaksannya Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1.644.051.625	1.556.649.000	1.148.523.300		1.582.915.355	1.496.787.536	1.118.647.671	
	Terlaksananya Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				448.499.650	401.873.750	266.487.700		435.838.030	381.418.496	261.213.036	
	Terlaksananya Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				264.999.650	311.664.000	242.312.050		244.148.696	298.193.900	222.636.120	
	Terlaksananya Analisis jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan				930.552.325	843.111.250	639.723.550		902.928.630	817.179.690	634.798.515	
	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1.480.601.400	1.734.492.550	1.727.298.625		1.404.527.756	1.662.370.210	1.651.213.687	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2022	2023	2024	2024	2022	2023	2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1	Thn n	Thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				329.101.775	486.805.350	584.720.725		317.364.230	454.506.620	544.911.081	
	Terlaksannya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				168.500.000	363.427.500	417.588.000		156.504.240	349.286.280	409.456.740	
	Terlaksannya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				168.000.000	310.000.000	83.190.000		145.326.200	296.567.960	82.388.840	
	Terlaksananya Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				514.999.800	155.020.100	167.350.250		489.682.036	146.513.080	182.531.460	
	Terlaksannya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				300.000.000	419.259.600	454.449.850		277.651.050	415.496.270	431.925.566	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Organisasi Setda. Prov. Sulteng

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, supervisi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan reformasi birokrasi, analisa dan kompetensi jabatan, kinerja dan pelayanan Publik.

Dalam menjalankan tugas tersebut Kepala Biro Organisasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan operasional di bidang Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, Analisa Jabatan dan Kompetensi Jabatan, Kinerja dan Pelayanan Publik;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, Analisa dan Kompetensi Jabatan, Kinerja dan Pelayanan Publik;
- c. pemantuan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, Analisa dan Kompetensi Jabatan, Kinerja dan Pelayanan Publik;
- d. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, Analisa dan Kompetensi Jabatan, Kinerja dan Pelayanan Publik;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk menjalankan fungsinya dibantu oleh bagian yaitu :

1. Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, supervisi, bimbingan teknis, memfasilitasi, melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah, dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah.
2. Bagian Analisa dan Kompetensi Jabatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, memfasilitasi, melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Analisa, Formasi Jabatan, evaluasi jabatan dan kompetensi jabatan, tata usaha.
3. Bagian Pembinaan Kinerja dan Pelayanan Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, memfasilitasi, melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana , Budaya Kerja, dan Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaan tugas masih terdapat permasalahan – permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi.		
Tingkat kematangan Organisasi Masih Rendah;	Evaluasi penyelenggaran dan penataan kelembagaan perangkat daerah belum berjalan semestinya, sebab data dukung sebagai alat verifikasi kurang tersedia di beberapa OPD	kurangnya komitmen pimpinan Perangkat Daerah terhadap Evaluasi Penyelenggaraan Kelembagaan
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Perangkat Daerah masih rendah		Tumpang tindih regulasi antar Kementerian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah
Susunan Organisasi Pasca Penyerderhanaan Birokrasi belum di atur dengan Peraturan Pemerinta	Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 belum selaras dengan kebijakan Penyerderhanaan Birokrasik	Regulasi belum disesuaikan
Implementasi Reformasi Birokrasi belum dilakukan secara terintegrasi pada seluruh	Komitmen Pimpinan utamanya Kepala Daerah dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan	- Politisasi dan Kooptasi Birokrasi, adanya hal ini menciptakan birokrasi yang tidak professional,

perangkat daerah, melainkan masih fokus pada pelaksanaan kegiatan di setiap kelompok kerja Tim Reformasi Birokrasi.	program Reformasi Birokrasi yang fokus dan terarah dengan dukungan keuangan yang memadai. Sehingga program yang dibuat lebih menasar pada kebutuhan masyarakat dengan dampak yang lebih terasa dan terjadinya perubahan budaya organisasi dan mindset ASN.	kinerja rendah dan tidak netral dalam penyelenggaraan pemerintahan
Bagian Analisa dan Kompetensi Jabatan		
Penyusunan Dokumen Evluasi Jabatan yang belum Efektif dan Makimal	- Proses Penyusunan Dokumen Evjab oleh Perangkat Daerah yang Memakan waktu Lama - Ketidakakuratan dalam deskripsi tugas dan tanggung jawab jabatan	- Kurang koordinasi antar pejabat Unit kerja terkait dalam proses penyusunan Evjab - Tidak sinkronnya antara tugas jabatan dan tanggung jawab hasil kerja
Penyusunan Dokumen SKJ yang belum Optimal	- Kompetensi Jabaatn yang tercantum tidak mencerminkan realitas tugas dan fungsi - Proses penyusunan dokumen SKJ yang lambat dan tidak terkoordinasi dengan baik antar unit kerja	- Kurang analisis secara mendalam tentang kebutuhan Kompetensi di masing-masing jabatan - Kurangnya koodinasi antara pejabat terkait dalam penyusunan dokumen SKJ
Belum maksimalnya penerapan hasil anjab dan ABK dilingkungan Pemerintah Prov. Sulteng		Belum tersampainya hasil sosialisasi/bimtek tentang Anjab dan ABK kepada kepala perangkat daerah dilingkup Pemprom Sulteng yang menyebabkan penempatan pegawai belum sesuai dengan hasil Anjab dan ABK yang telah disusun dan telah ditetapkan penetapan SDM Aparatur dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih menganut pola yang lama dalam artian belum memaksimalkan hasil Anjab dan ABK sebagai dasar penataan SDM aparatur sehingga perlu adanya perubahan mindset.
Bagian Kinerja dan Pelayanan Publik		
Masih terdapat beberapa informasi yang belum disampaikan dalam LKjIP LKJ Perangkat Daerah	Kurangnya data dan informasi analisis Program/Kegiatan yang menunjang kegagalan/keberhasilan dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dan kinerja Perangkat Daerah	Masih kurangnya komitmen dan kepedulian pimpinan terkait pentingnya laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas hasil dari perjanjian kinerja dari masing-masing pejabat
Secara kualitas dan kuantitas, dokumen probis perangkat daerah belum tepat sasaran sesuai arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Dokumen probis perangkat daerah hanya sebatas pemenuhan data.dokumen	Masih minimnya pemahaman pejabat terkait dengan penyusunan probis perangkat daerah
Belum tersusunnya SOP Perangkat Daerah	SOP Perangkat Daerah disusun berdasarkan probis perangkat daerah yang tlah disahkan dengan surat keputusan kepala perangkat daerah	Probis perangkat daerah secepatnya disusun dan ditetapkan agar SOP Perangkat daerah dapat disusun berdasarkan probis perangkat daerah

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

Regulasi terkait Budaya Kerja BerAKHLAK samapai saat ini masih dalam tahapan penyusunan	Imlementasi budaya kerja BerAHLAK Belum dapat dilaksanakan secara optimal pada perangkat daerah	Budaya Kerja belum dapat ditinda lanjuti dengan peraturan kepala daerah terkait dengan imlementasi budaya kerja pada perengakat daerah
Belum optimalnya penerapan dari kebijakan Pelayanan publik terkait (FKP,SP,SKM,Inovasi, dan Pengaduan) serta pelaksanaan PEKPPP Nasional dan Mandiri	- Standar Pelayanan telah disusun oleh semua Perangkat Daerah, hanya saja belum semua Perangkat Daerah yang menginput daftar nama Standar Pelayanan ke Aplikasi SIPPN untuk dipublikasikan ke masyarakat.	Pejabat Teknis / Penanggung Jawab Aplikasi pada Perangkat Daerah belum memperbaharui data Standar Pelayanan pada SIPPN akibat kurangnya komitmen pimpinan atas surat pemberitahuan dari Biro Organisasi untuk penginputan Standar Pelayanan pada aplikasi SIPPN yang ditiap awal tahun akan di ekspos kepatuhannya oleh Kemenpan RB.
	- Kurangnya pemahaman pelaksana teknis terkait penyebaran kuesioner yang digunakan sebagai alat ukur dan output Pelayanan pada Perangkat Daerah yang kemudian dibuatkan Laporan Tindak Lanjutnya guna peningkatan kualitas Pelayanan Publik. - Implementasi SKM dan Penyusunan Laporan SKM belum tepat waktu oleh perangkat daerah; - Penerapan Aplikasi SKM Online belum terimplementasi pada semua Perangkat Daerah.	Kurangnya komitmen pimpinan Perangkat Daerah tentang manfaat pelaksanaan SKM sebagai alat ukur dari kualitas Pelayanan
	- Belum dilaksanakannya Bimbingan Teknis Profesionalisme Sumber Daya Manusia guna pencapaian <i>Service Excellent</i> pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi	Masih kurangnya Pemahaman ASN tentang jenis layanan/priosedur kelengkapan penunjang tugas dan fungsi (pelayanan) pada perangkat daerah
	- Telah dilaksanakannya PEKPPP (Pemantauan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik) secara mandiri di lingkup Perangkat Daerah Provinsi Sulteng guna Peningkatan kualitas pelayanan publik; - Belum terpenuhnya aspek-aspek penunjang peningkatan kualitas Pelayanan publik pada Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	Telah terpenuhi pada perangkat daerah lingkup Provinsi namun masih terdapat beberapa perangkat daerah yang menjadi prioritas percepatan
	- Pendampingan dan Pelaksanaan PEKPPP lokus Nasional; - Belum terpenuhnya aspek-aspek penunjang peningkatan kualitas Pelayanan publik pada lingkup Provinsi Sulawesi Tengah penunjang <i>Reward Service Excellent</i> Nasional	Belum terpenuhnya aspek-aspek penunjang peningkatan kualitas Pelayanan publik pada lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Biro Organisasi Setda Prov. Sulteng Tahun 2025

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Biro Organisasi Setda Prov. Sulteng

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		- Indeks IKM Biro	90 Indeks	1.250.000.78 0		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		- Indeks IKM Biro	90 Indeks	1.933.747.295
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Biro Organisasi	100%	83.930.000		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Biro Organisasi	100%	85.130.050
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Biro Organisasi Yang Disusun	7 Dok	83.930.050		Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Biro Organisasi Yang Disusun	7 Dok	Jumlah dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja, RKT, Lapkin dan Reformasi Birokrasi dan laporan keuangan	8 Dok	85.130.050
			Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Biro Organisasi Yang Disusun	6 Dok			Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Biro Organisasi Yang Disusun			6 Dok	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	100%	385.272.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	100%	417.882.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Jumlah SPM Pencairan Gaji dan Tunjangan	14 Dok	385.272.000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Jumlah SPM Pencairan Gaji dan Tunjangan	14 Dok	417.882.000

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			ASN/Non ASN yang tepat waktu						ASN/Non ASN yang tepat waktu		
			Jumlah SPP/SPM yang Diterbitkan Tepat Waktu	300 Dok					Jumlah SPP/SPM yang Diterbitkan Tepat Waktu	300 Dok	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Lap					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Lap	
	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang memperoleh layanan kepegawaian	100%	62.809.018		Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang memperoleh layanan kepegawaian	100%	62.809.018
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palu	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	57 Lembar	27.225/018		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palu	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	57 Lembar	27.225.018
	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Palu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	35.584.000		Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Palu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	35.584.000
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16 Dok					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16 Dok	
			Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan SKJ Biro	3 Dok					Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan SKJ Biro	3 Dok	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			Organisasi yang disusun						Organisasi yang disusun		
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan Adminitrasi kantor yang tersedia dan terpenuhi	100%	556.852.040		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan Adminitrasi kantor yang tersedia dan terpenuhi	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	162.978.940		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	533.961.477
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	29.999.950		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	30.799.950
	Penyelenggara an Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Kabupaten / Kota Yang Terkoordinasi	14 Kab/kot a	363.873.150		Penyelenggar aan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Kabupaten / Kota Yang Terkoordinasi	14 Kab/k ota	528.758.750
			Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro Organisasi Yang Disusun	2 Dok					Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro Organisasi Yang Disusun	2 Dok	
			Jumlah Laporan Internalisasi ASN Ber-AKHLAK	1 Lap					Jumlah Laporan Internalisasi ASN Ber-AKHLAK	1 Lap	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	1 Dok					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	1 Dok	

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah						Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terpenuhi	100%	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terpenuhi	100%	0
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Kearsipan Yang Memenuhi Standar	100%	35.400.050		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Kearsipan Yang Memenuhi Standar	100%	35.400.050
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palu	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar Yang Teradministrasi	100%	35.400.050		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar Yang Teradministrasi	100%	35.400.050
			Persentase Arsip yang Tertata Sesuai Ketentuan	100%					Persentase Arsip yang Tertata Sesuai Ketentuan	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara dan terinventarisasi	100%	206.190.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara dan terinventarisasi	100%	244.840.000

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara	22 Unit	164.160.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara	22 Unit	199.160.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	50 Unit	42.030.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	50 Unit	45.680.000
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja,	14 Nilai	2.369.415.050		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Perangkat daerah dengan nilai IKM Katagori Baik	100%	3.291.141.550
			Persentase penataan jabatan PD yang proporsional	100%					Persentase penataan jabatan PD yang proporsional	100%	
			Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	36 Indeks					Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	36 Indeks	
			Nilai Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Dimensi Struktur	78 Nilai					Nilai Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Dimensi Struktur	78 Nilai	

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Kerja Baru	100%					Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Kerja Baru	100%	
			Indeks Ber-AKHLAK Pemerintah Daerah	76 Indeks					Indeks Ber-AKHLAK Pemerintah Daerah	76 Indeks	
			Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi Minimal "B"	70 Persen					Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi Minimal "B"	70 Persen	
			Indeks Pelayanan Publik	3.00 Indeks					Indeks Pelayanan Publik	3.00 Indeks	
			Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah,	88 Nilai					Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah,	88 Nilai	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	90 Indeks					Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	90 Indeks	
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Nilai Komposit Struktur Organisasi yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran yang tercapai	78 Nilai	1.164.415.550		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Nilai Komposit Struktur Organisasi yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran yang tercapai	78 Nilai	1.556.649.000
			persentase Persentase Kab/Kota dengan Indeks Tingkat Kematangan	100%					persentase Persentase Kab/Kota dengan Indeks Tingkat Kematangan	100%	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			Organisasi Kategori Sedang						Organisasi Kategori Sedang		
			persentase Persentase Rekomendasi Penataan Kelembagaan Kabupaten / Kota yang diterbitkan	100%					persentase Persentase Rekomendasi Penataan Kelembagaan Kabupaten / Kota yang diterbitkan	100%	
			Persentase SKJ Perangkat Daerah Yang Sesuai Rekomendasi Kemen PAN RB	100%					Persentase SKJ Perangkat Daerah Yang Sesuai Rekomendasi Kemen PAN RB	100%	
			Persentase evaluasi jabatan yang tervalidasi	100%					Persentase evaluasi jabatan yang tervalidasi	100%	
			Persentase Formasi Jabatan Fungsional yang mendapat Rekomendasi Kemen PAN RB	100%					Persentase Formasi Jabatan Fungsional yang mendapat Rekomendasi Kemen PAN RB	100%	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Pusa t, Prov, Kab/ Kota	Jumlah Kelembagaan Provinsi yang dievaluasi	40 PD	326.874.250		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Pusat, Prov,K ab/Ko ta	Jumlah Kelembagaan Provinsi yang dievaluasi	40 PD	401.873.750
			Jumlah Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi yang tertata	40 PD					Jumlah Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi yang tertata	40 PD	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan	Pusa t, Prov,	Persentase Dokumen Rekomendasi Penataan	100%	171.664.550		Fasilitasi Penataan Kelembagaan	Pusat, Prov,K	Persentase Dokumen Rekomendasi Penataan	100%	311.664.000

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Kabupaten/Kota	Kab/ Kota	Kelembagaan Kabupaten / Kota yang diterbitkan				Kabupaten/Kota	ab/Ko ta	Kelembagaan Kabupaten / Kota yang diterbitkan		
			Jumlah Kab/Kota yang mencapai Indeks Kematangan Kategori Sedang	4 Kab					Jumlah Kab/Kota yang mencapai Indeks Kematangan Kategori Sedang	4 Kab	
	Penataan Analisis Jabatan	Pusa t, Prov, Kab/ Kota	Jumlah Standar Kompetensi Jabatan Struktural Perangkat Daerah yang terfasilitasi	40 PD	665.876.750		Penataan Analisis Jabatan	Pusat, Prov,K ab/Ko ta	Jumlah Standar Kompetensi Jabatan Struktural Perangkat Daerah yang terfasilitasi	40 PD	843.111.250
			Jumlah SKJ yang mendapatkan rekomendasi	1 Dok					Jumlah SKJ yang mendapatkan rekomendasi	1 Dok	
			Jumlah dokumen evaluasi jabatan Perangkat Daerah yang terfasilitasi	40 PD					Jumlah dokumen evaluasi jabatan Perangkat Daerah yang terfasilitasi	40 PD	
			Jumlah dokumen evaluasi Jabatan yang tervalidasi	1 Dok					Jumlah dokumen evaluasi Jabatan yang tervalidasi	1 Dok	
			Persentase Usulan Permohonan Jabatan Fungsional yang terverifikasi	100%					Persentase Usulan Permohonan Jabatan Fungsional yang terverifikasi	100%	
			Jumlah Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah yang difasilitasi	40 PD					Jumlah Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah yang difasilitasi	40 PD	
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan	Pusa t, Prov,	Persentase LKIP Pemerintah daerah dan LKIP Perangkat Daerah	100%	1.204.999.50 0		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan	Pusat, Prov,K ab/Ko ta	Persentase LKIP Pemerintah daerah dan LKIP Perangkat Daerah	100%	1.734.492.550

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Akuntabilitas Kinerja	Kab/ Kota	yang memenuhi 7 Informasi	100%			Akuntabilitas Kinerja		yang memenuhi 7 Informasi	100 %	
			Persentase Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda dan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Perundang- undangan						Persentase Perangkat daerah yang telah menyusun Perjanjian Kinerja dan LKjIP		
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Kerja Baru	100%					Persentase PD yang telah menerapkan Budaya Kerja ASN BERAKHLAK	100%	
			Persentase Perangkat Daerah yang telah menyesuaikan Proses Bisnis dan SOP sesuai Sistem Kerja Baru	100%					Persentase PD yang telah Menerapkan Tatalaksana Pemerintahan	100%	
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan budaya kerja berAKHLAK	100%					Persentase PD yang telah Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			Persentase Indikator RB Perangkat Daerah yang terpenuhi								
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3.00 INDEKS					Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3.00 INDEKS	
			persentase Kab/Kota dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori Baik	50%					persentase Kab/Kota dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori Baik	50%	
			Persentase Perangkat Daerah Lokus Evaluasi Ombudsman Yang Meningkatkan Kepatuhan Pelayanan Publik	100%					Persentase Perangkat Daerah Lokus Evaluasi Ombudsman Yang Meningkatkan Kepatuhan Pelayanan Publik	100%	
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pusat, Prov, Kab/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina RB	40 PD	249.999.750		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pusat, Prov,K ab/Ko ta	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina RB	40 PD	486.805.350
			Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring RB	40 PD					Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring RB	40 PD	
			Jumlah Rekomendasi Perbaikan Hasil Pelaksanaan Reformasi	40 Rekom endasi					Jumlah Rekomendasi Perbaikan Hasil Pelaksanaan Reformasi	40 Reko mend asi	

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			Birokrasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah						Birokrasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah		
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Pusa t, Prov, Kab/ Kota	Jumlah LKIP Pemerintah Daerah yang tersusun	1 Dok	370.0000.00 0		Monitoring dan Evaluasi Akuntabilita s Kinerja	Pusat, Prov,K ab/Ko ta	Jumlah LKIP Pemerintah Daerah yang tersusun	1 Dok	363.427.500
			Jumlah LKIP Perangkat Daerah yang Terverifikasi	40 PD					Jumlah LKIP Perangkat Daerah yang Terverifikasi	40 PD	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait pelaporan kinerja	3 Kab/K ota					Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait pelaporan kinerja	3 Kab/ Kota	
			Jumlah IKU dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah yang tersusun	2 Dok					Jumlah IKU dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah yang tersusun	2 Dok	
			Jumlah IKU dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang terverifikasi	40 PD					Jumlah IKU dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang terverifikasi	40 PD	
			Jumlah Laporan hasil Evaluasi Dokumen Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	1 lap					Jumlah Laporan hasil Evaluasi Dokumen Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	1 lap	

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Pusa t, Prov, Kab/ Kota a	Jumlah berita acara hasil Survei Internal Ber-AKHLAK pada Perangkat Daerah	1 Berita Acara	160.0000.000		Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Pusat, Prov,K ab/Ko ta a	Jumlah berita acara hasil Survei Internal Ber-AKHLAK pada Perangkat Daerah	1 Berita Acara	310.000.000
			Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi budaya kerjanya	40 PD					Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi budaya kerjanya		
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Pusa t, Prov, Kab/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina	40 PD	125.000.000		Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Pusat, Prov,K ab/Ko ta	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina	47/13 PD&K ab/Ko ta	155.020.100
			Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi	40 PD					Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi		
			Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyusun Proses Bisnis dan SOP sesuai RPJMD	40 pd					Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyusun Proses Bisnis dan SOP sesuai RPJMD		
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Pusa t, Prov, Kab/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dibina pelayanan publiknya	40 PD	299.999.750		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Pusat, Prov,K ab/Ko ta	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dibina pelayanan publiknya	47/1 3 PD& Kab/ Kota	419.259.600

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplemen tasikan Standar Pelayanan	41 PD					Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplemen tasikan Standar Pelayanan		
			Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat	40 PD					Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat	40 PD	
			Jumlah Perangkat Daerah Lokus Evaluasi Kab/Kota yang dibina pelayanan publiknya	78 Perangk at Daerah Lokus Kab/Ko ta					Jumlah Perangkat Daerah Lokus Evaluasi Kab/Kota yang dibina pelayanan publiknya	78 Peran gkat Daera h Lokus Kab/ Kota	
			Jumlah Perangkat Daerah Lokus Evaluasi Yang Didampingi dalam Kepatuhan Pelayanan Publiknya	5 PD					Jumlah Perangkat Daerah Lokus Evaluasi Yang Didampingi dalam Kepatuhan Pelayanan Publiknya	5 PD	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya.

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Biro Organisasi

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sesuai VISI Gubernur Sulawesi Tengah **“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029”** Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pada Misi 4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.

Adapun Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas pada Program Biro Organisasi dalam Rencana Aksi yang merupakan Sasaran Strategis dalam Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah diturunkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi. Sasaran tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Terwujudnya Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang ditandai dengan :

- a. Nilai SAKIP Biro Organisasi
- b. Indek Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi.
- c. Persentase Capaian Realisasi Anggaran Perangkat Daerah.
- d. Persentase Pelayanan Administrasi Kantor yang tersedia dan terpenuhi.
- e. Persentase Pegawai yang memperoleh layanan kepegawaian
- f. Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terpenuhi
- g. Persentase Pelayanan Kearsipan Yang Memenuhi Standar
- h. Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara dan terinventarisasi
- i. Nilai Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Dimensi Struktur.
- j. Persentase Kab/Kota yang terevaluasi Kelembagaannya.
- k. Persentase Standar Kompetensi Jabatan Yang Mendapatkan Persetujuan MENPAN RB.

Tujuan dan sasaran Biro Organisasi Setda Prov. Sulteng yang mengacu pada RPJMD 2025-2029 disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkaulitas	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	36,00	38,00	38,50	38,75	39,00
	Meningkatnya Penerapan Hasil pembinaan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Indeks	54,00	65,00	78,00	83,00	88,00
		IKM PEMDA	Indeks	83,50	85,00	86,50	88,00	89,00
	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemda	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	13,02	13,03	13,04	13,05	13,06
	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi General	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai RB Minimal "B"	Persentase	20,00	40,00	60,00	80,00	100
	Meningkatnya penerapan budaya kerja pada perangkat daerah	Indeks Ber-AKHLAK Pemerintah Daerah	Indeks	68,00	69,00	70,00	71,00	72,00
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	Indeks	89	90	91	92	93

3.2 Program dan Kegiatan

Berdasarkan RKPD Perubahan Biro Organisasi Setda prov. Sulteng Tahun 2025 Telah Tersusun 2 (dua) Program yang terjabarkan dalam 9 (Sembilan) Kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Biro Organisasi Setda Prov. Sulteng

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		3	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
				4	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
		4	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				7	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, , Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
				11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	Program Penataan Organisasi	8	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
				13	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

				14	Penataan Analisis Jabatan
		9	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	15	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
				16	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
				17	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
				18	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
				19	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Organisasi

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-1 s/d n-2)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Cat ata n Pen ting
				2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12
Total			3.474.645.967		5.224.888.845		5.310.323.390		1.619.442.500		5.776.040.300		
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	1.432.043.106	90 Ind eks	1.933.747.295	80,60, 76,61 Inde ks	2.434.501.465	89,5 4 Indeks	946.471.450	80,60 ,76,6 1	2.092.813.300		
4.01.01. 1.01	Perencanaan, Pen gganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Biro Organisasi	52.884.050	100 Perse n	85.130.050	100 Perse n	64.840.950	100 Persen	20.886.000	100 Pers en	92.630.050	Palu	
4.01.01. 1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaa n Kinerja Biro Organisasi Yang Disusun	52.884.050	8 Dok	85.130.050	8 Dok	64.840.950	7 Dok	20.886.000	8 Do k	92.630.050	Palu	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Biro Organisasi Yang Disusun						6 Dok					
4.01.01. 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Persentase Capaian Realisasi APBD	392.280.000	100 Perse n	417.882.000	100 Perse n	361.590.000	100 Persen	410.490.000	100 Pers en	448.872.000	Palu	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-1 s/d n-2)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Cat ata n Pen ting
				2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12
		Perangkat Daerah											
4.01.01. 1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah SPM Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN/Non ASN yang tepat waktu	392.280.000	13 Orang	417.882.000	13 orang	361.590.000	14 Dok	410.490.000	13 orang	448.872.000	Palu	
		Jumlah SPP/SPM yang Diterbitkan Tepat Waktu						300					
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah						1 Laporan					
4.01.01. 1.05	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang memperoleh layanan kepegawaian	8.000.000	100 Persen	86.975.018	100 Persen	446.813.000	100 Persen	4.795.000	100 Persen	266.410.000	Palu	
4.01.01. 1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	8.000.000	10 Lembar	27.225.018	55 Lembar	38.540.000	57 Lembar	0	55 Lembar	108.650.000	Palu	
4.01.01. 1.05.09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0		9.750.000	5 Org	408.273.000	15 Org	4.795.000	5 Org	157.760.000	Palu	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-1 s/d n-2)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Cat ata n Pen ting
				2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						3 Dok					
4.01.01.1.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi kantor yang tersedia dan terpenuhi	692.085.931	100 Perse n	1.113.520.177	100 Perse n	1.200.831.415	100 Persen	254.622.000	100 Pers en	927.561.200	Palu	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengka p n Kantor yang disediakan	318.663.956	5 Pak et	553.961.477	5 Pak et	582.304.385	6 Paket	78.168.050	5 Pa ket	350.000.000	Palu	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	44.001.800	5 Pak et	30.799.950	5 Pak et	29.999.950	5 Paket	11.887.950	5 Pa ket	355.778.00	Palu	
4.01.01.1.07	Penyelenggara an Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Kabupaten / Kota Yang Terkoordinasi	329.420.175	13 Lap	528.758.750	13 Lap	588.527.100	14 Kab/kot a	164.566.000	13 La p	541.983.400		
		Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro						2 Dok					

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-1 s/d n-2)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Cat ata n Pen ting
				2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12
		Organisasi Yang Disusun											
		Jumlah Laporan Internalisasi ASN Ber- AKHLAK						1 Lapora n					
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah						1 Dok					
4.01.01. 1.07.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terpenuhi	21.000.000	100 Perse n	0	100 Perse n	22.220.000	100 Persen	0	100 Pers en	60.000.000	Palu	
4.01.01. 1.06.05	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	21.000.000	2 Uni t	0	2 Unit	22.220.000	3 Unit	0	2 Uni t	60.000.000	Palu	
4.01.01. 1.08.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Kearsipan Yang Memenuhi Standar	26.313.125	100 Perse n	35.400.050	100 Perse n	23.576.100	100 Persen	13.673.450	100 Pers en	35.400.000	Palu	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-1 s/d n-2)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Cat ata n Pen ting
				2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12
4.01.01. 1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar Yang Teradministrasi	12 Laporan	12 Lap	35.400.050	12 Lap	23.576.100	100 Persen	13.673.450	12 La p	35.400.000		
		Persentase Arsip yang Tertata Sesuai Ketentuan						100 Persen					
4.01.01. 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara dan terinventarisasi	219.480.000	5 Unit	244.840.000	Unit	314.530.000	5 Unit	242.005.000	5 Uni t	261.740.000		
4.01.01. 1.09.01	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara	178.000.000	22 Unit	199.160.000	22 Unit	257.900.000	22 Unit	214.115.000	22 Uni t	219.710.000	Palu	
4.01.01. 1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	41.480.000	30 Unit	45.680.000	30 Unit	56.530.000	50 Unit	27.890.000	30 Uni t	42.030.000		
4.01.02	PENATAAN ORGANISASI	Indek Kematangan Organisasi	1.339.339.250	100 Perse n	3.291.141.550	100 Perse n	2.875.521.925	36 lndeks	672.971.050	100 Pers en	3.683.427.000	Kab/ Kota	
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik						54 lndeks		100 Pers en			

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-1 s/d n-2)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Cat ata n Pen ting
				2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12
4.01.01. 1.13.01		IKM PEMDA						83, Indeks 50		100 Pers en		Pusat Prov. Kab/ Kota	
		Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja						13, Nilai 02		100 Pers en			
		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi Minimal "B"						20 Persen		100 Pers en			
		Indeks Ber- AKHLAK Pemerintah Daerah						68 Indeks					
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai Evaluasi Kelembagaa n Perangkat Daerah Dimensi Struktur	1.103.076.475	100 Pers en	1.556.649.000	100 Pers en	1.148.523300	78 Nilai	331.282.100	80 Nil ai	1.850.000.000		
		Persentase Kab/Kota yang Terevaluasi Kelembagaa nya						100 Persen					
		Persentase Perangkat Daerah yang mendapatka n Peringkat Komposit P- 4						100 Persen					
		Persentase SKJ Perangkat yang mendapatka		100 Pers en		100 Pers en		100 Persen		10 0			

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-1 s/d n-2)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Cat ata n Pen ting
				2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12
		n Persetujuan MENPAN RB											
		Persentase evaluasi jabatan yang yang mendapatka n Persetujuan MENPAN RB						100 Persen					
		Persentase Formasi Jabatan Fungsional yang mendapatka n Persetujuan MENPAN RB						100 Persen					
4.01.02. 1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaa n Provinsi	264.729.950	1 Dok	401.873.750	1 Dok	266.487.700	1 Lap	86.396.950	1 Do k	450.000.000	Pusat Prov. Kab/ Kota	
		Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaa n Perangkat Daerah						1 Dok					
4.01.02. 1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kot a	Persentase Dokumen Rekomendas i Penataan Kelembagaa n Kabupaten	187.785.000	13 Dok	311.664.000	13 Dok	242.312.050	100 %	87.918.300	13 Do k	400.000.000	Pusat Prov. Kab/ Kota	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-1 s/d n-2)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Cat ata n Pen ting
				2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12
		/ Kota yang diterbitkan										Pusat Prov. Kab/ Kota	
		Jumlah Kab/Kota yang mencapai Indeks Kematangan Kategori Sedang						4 Kab/kot a					
4.01.02. 1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Standar Kompetensi Jabatan Struktural Perangkat Daerah yang tersusun	676.169.150	188 Dok	843.111.250	188 Dok	639.723.550	40 Dok	156.966.850	188 Do k	1.000.000.000		
		Jumlah SKJ yang mndapatkan rekomendasi						1 Dok					
		Jumlah dokumen evaluasi jabatan Perangkat Daerah yang terfasilitasi						40 Dok					
		Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan yang Tervalidasi						1 Dok					
		Persentase Usulan Permohonan Jabatan Fungsional yang terverifikasi						100 %					

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-1 s/d n-2)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Cat ata n Pen ting			
				2023		2024		2025		2026						
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12			
		Jumlah Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah yang difasilitasi						40 Dok								
4.01.02. 1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Capaian Pembangun an Rencana Aksi RB General Perangkat Daerah dengan Kategori Baik	939.526.386	100 Perse n	1.734.492.550	100 Perse n	1.727.298.625	100 Persen	341.688.800	100 Pers en	1.883.427.000	Pusat Prov. Kab/ Kota				
		Persentase LKIP Pemerintah daerah dan LKIP Perangkat Daerah yang memenuhi 7 Informasi														
		Persentase Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda dan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Perundang- undangan										100 Persen				
		Persentase Perangkat Daerah yang										100 Persen				

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-1 s/d n-2)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Cat ata n Pen ting	
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12	
		telah menerapkan Sistem Kerja Baru						100	Persen					
		Persentase PD yang telah menyesuaikan Probis dan SOP sesuai Sistem Kerja Baru												
		Persentase Perangkat Daerah dengan hasil budaya Kerja ber AHKLAK katagori sehat												
		Persentase kab/kota yang terbina pelayanan publiknya	100											Persen
		Persentase PD Provunsi dengan Nilai IKM Baik	100											Persen
		Persentase PD dengan IPP Mandiri Kategori BAIK	10											Persen

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-1 s/d n-2)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Cat ata n Pen ting
				2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12
4.01.02. 1.02.01		Persentase unit lokus evaluasi (ULE) Provinsi dengan nilai kepatuhan zona hijau						10 Persen					
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yg dibina penerapan Road Map Reformasi Birokrasi	217.479.525	1 Dok	486.805.350	1 Dok	584.720.725	40 PD	87.757.950	1 Do k	400.000.000	Pusat Prov. Kab/ Kota	
		Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring penerapan Road Map Reformasi Birokrasi						40 PD					
		Jumlah Rekomendas i Perbaikan Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah						40 Rekom endasi					
		Jumlah Kab/kota yang dibina pelaksanaan Reformasi Birokrasi						3 Kab/Kot a					

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-1 s/d n-2)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Cat ata n Pen ting
				2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12
4.01.02. 1.02.01	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah LKIP Pemda yang tersusun	183.229.825	2 Dok	363.427.500	2 Dok	417.588.000	1 Dok	80.079.100	2 Dok	363.427.000	Pusat Prov. Kab/ Kota	
		Jumlah LKIP Perangkat Daerah yang Terverifikasi						48 PD					
		Jumlah Kabupaten/K ota yang dibina terkait pelaporan kinerja						3 Kab/kot a					
		Jumlah IKU dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah						2 Dok					
		Jumlah IKU Revisi dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang terverifikasi						40 PD					
4.01.02. 1.02.01	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang nilai Evalusi Budaya Kerja Kategori Baik	100.054.586	47/13 PD, Kab / kota	310.000.000	47/13 PD, Kab/ kota	83.190.000	40 PD	22.520.200	47/13 PD , Ka b/ kot a	250.000.000	Pusat Prov. Kab/ Kota	
4.01.02. 1.02.01	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina sistem Kerja Baru	118.783.225	47/13 PD, Kab / kota	155.000.100	47/13 PD, Kab/ kota	187.350.250	40 PD	62.473.550	47/13 PD , Ka b/ kot a	310.000.000	Pusat Prov. Kab/ Kota	
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah						40 Dol					

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-1 s/d n-2)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Cat ata n Pen ting
				2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12
		menyesuaika n Proses Bisnis dan SOP										Pusat Prov. Kab/ Kota	
4.01.02. 1.02.01	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dibina pelayanan publiknya	319.979.225	47/13 PD, Kab / kota	419.259.600	47/13 PD, Kab/ kota	454.449.650	50 PD	88.858.000	47/13 PD , Ka b/ kot a	510.000.000		
		Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplem entasikan Standar Pelayananny a						50 PD					
		Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanaka n Survei Kepuasan Masyarakat secara online						50 PD					
		Jumlah Kab/Kota yang di bina yang dibina pelayanan publiknya untuk persiapan evaluasi						13 Kab/kot a					
		Jumlah Perangkat Daerah Lokus Evaluasi Yang Didampingi						5 PD					

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BIRO ORGANISASI

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-1 s/d n-2)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Cat ata n Pen ting
				2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12
		dalam Kepatuhan Pelayanan Publiknya											

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Biro Perubahan Organisasi Tahun 2025 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja Perubahan tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Biro Organisasi Periode 2025-2029, dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Ada Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Dengan dilaksanakan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah dan Penyerderhaan Birokrasi , perlu segera dilaksanakan:
 - a. Pengevaluasian perangkat daerah apakah perangkat daerah yang telah ditetapkan telah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Penyusunan perubahahan uraian tugas jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan. Hal ini penting untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi, ukuran dan sinergi.
 - c. Penyusunan dokumen evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan hal ini penting penentuan klas jabatan dan besaran TPP dan penempatan jabatan dan formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi.
 - d. Review/Penyusunan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
 - e. Pelaksanaan Budaya Kerja, Tatalaksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
 - f. Review Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Peta Proses Bisnis (PROBIS) Provinsi Sulawesi Tengah
 - g. Penguatan dalam Penerapan System Kerja baru pada Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- h. Penguatan Dalam Penerapan Budaya Kerja Pada Perangkat Daerah
 - i. Penguatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Keuangan, Aset Sarana dan Prasarana pada Biro Organisasi Setda Prov. Sulteng
2. Penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2025. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas yang telah dicapai perlu secara konsisten dilakukan penyusunan dokumen laporan kinerja dan perjanjian kinerja Provinsi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,
3. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) Implementasi ini melalui perbaikan kualitas dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014, serta meningkatkan Pemanfaatan Aplikasi BERANI SELARAS hal yang sangat mempengaruhi SAKIP adalah Komitmen Pejabat Struktural dan seluruh ASN untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel.
4. Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terus dilakukan peningkatan. Dalam hal kebijakan Pelayanan, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Penyusunan Standar Pelayanan, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat merupakan suatu kebijakan Pelayanan Publik yang terdapat keterlibatan masyarakat didalamnya. Selain itu, perlu untuk mengoptimalkan penggunaan portal pengaduan SP4N Lapor! dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional sebagai portal informasi yang terintegrasi. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik menuju Pelayanan Prima dalam mendukung Reformasi Birokrasi salah satunya dengan menggerakkan Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menciptakan Inovasi Pelayanan Publik yang berdampak bagi setiap unsur layanan yang ada di masing-masing perangkat daerah tersebut. Salah satu upaya yang akan dilaksanakan yakni dengan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri untuk melihat sejauh mana Perangkat Daerah yang telah melaksanakan amanat perundang-undangan.
4. Manajemen perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan awal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu pemerintahan yang baik dan

professional secara berkelanjutan. Penyusunan Road Map tentang reformasi birokrasi merupakan suatu yang penting untuk dilaksanakan bagi seluruh aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai obyek dan subyek reformasi birokrasi itu sendiri, dan hal ini merupakan perkuatan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Komitmen Pimpinan utamanya Kepala Daerah dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang fokus dan terarah dengan dukungan keuangan yang memadai. Sehingga program yang dibuat lebih mendasar pada kebutuhan masyarakat dengan dampak yang lebih terasa dan terjadinya perubahan budaya organisasi dan mindset ASN

Rencana Kerja Tahunan Perubahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan kondisi yang realistis dari perencanaan kegiatan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Perubahan Tahun 2025 tergantung pada sikap, mental, tekad serta semangat dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitannya maka diharapkan seluruh aparat Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjadikan Rencana Kerja Anggaran di setiap Biro sebagai dokumen yang mengacu pada Renja Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2025-2029 sehingga pelaksanaan rencana berjalan secara sistematis dan sinergis.

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 **BIRO ORGANISASI**

Demikian Rencana Kerja Tahunan Perubahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 ini diajukan untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Palu, 12 September 2025

KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULTENG



NENG ELLY, SH, MM

Pembina Utama Muda

Nip.19730601 199503 2 002